



Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dan Board Gender Diversity Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Janatul Nasyalwa¹, Titik Aryati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

023002202028@std.trisakti.ac.id¹, titik_aryati@trisakti.ac.id^{*2}

Abstrak

Perubahan iklim menjadi isu global yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan board gender diversity terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 131 observasi penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Komite audit, kepemilikan institusional, dan board gender diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 6,57% menunjukkan bahwa variasi pengungkapan emisi karbon masih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Pengungkapan Emisi Karbon; Komisaris Independen; Corporate Governance

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah mendorong peningkatan aktivitas industri di berbagai negara. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas industri yang semakin meningkat juga menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Isu perubahan iklim kemudian menjadi perhatian utama berbagai pihak karena berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia.

Indonesia turut memberikan perhatian terhadap isu perubahan iklim melalui komitmen pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060. Sektor energi menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Aktivitas operasional sektor ini memerlukan penggunaan energi dalam jumlah besar. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya tuntutan transparansi terkait dampak lingkungan perusahaan.

Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan. Informasi emisi karbon juga menunjukkan upaya perusahaan dalam mengurangi dampak negatif aktivitas operasionalnya. Transparansi tersebut semakin penting karena investor mulai mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Pengungkapan informasi lingkungan dapat digunakan untuk meningkatkan legitimasi perusahaan. Tingkat pengungkapan yang baik dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga terdapat variasi antar perusahaan. Variasi tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan. Corporate governance menjadi salah satu faktor yang diduga berperan penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat mendorong pengungkapan informasi lingkungan secara lebih luas.

Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Komite audit juga berperan dalam memastikan kualitas pelaporan perusahaan. Kepemilikan institusional dipandang mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena investor institusional memiliki kepentingan jangka panjang.

Sektor energi di Indonesia memegang peran yang sangat krusial sekaligus paradoks dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, sektor ini merupakan motor penggerak utama perekonomian yang menyediakan pasokan listrik, bahan

bakar, dan komoditas ekspor strategis seperti batu bara dan gas alam. Di sisi lain, aktivitas eksplorasi, produksi, dan distribusi energi konvensional berbasis fosil menyumbang porsi terbesar dalam pelepasan emisi karbon dioksida (CO_2) ke atmosfer. Paradoks ini menempatkan perusahaan sektor energi di bawah sorotan tajam masyarakat dan regulator, yang menuntut adanya transformasi menuju praktik bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Memasuki periode 2022–2024, dinamika industri energi di Indonesia mengalami pergeseran pasca-pandemi yang disertai dengan fluktuasi harga komoditas global dan pengetatan regulasi lingkungan. Pemerintah Indonesia secara progresif mulai menerapkan taksonomi hijau dan merancang mekanisme nilai ekonomi karbon (pajak karbon). Situasi ini memaksa perusahaan-perusahaan energi untuk tidak lagi sekadar berfokus pada maksimisasi laba jangka pendek, melainkan juga harus memitigasi risiko transisi iklim. Oleh karena itu, periode ini menjadi momentum yang sangat relevan untuk mengamati sejauh mana komitmen transparansi lingkungan perusahaan energi diimplementasikan melalui pengungkapan emisi karbon.

Secara teoretis, urgensi pengungkapan emisi karbon dapat dibedah lebih dalam menggunakan integrasi antara teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan beroperasi di bawah kontrak sosial dengan masyarakat tempat mereka berada. Ketika masyarakat menilai bahwa aktivitas operasional perusahaan energi merusak ekosistem melalui emisi yang tidak terkendali, legitimasi perusahaan akan terancam. Dalam konteks ini, pengungkapan emisi karbon berfungsi sebagai alat komunikasi strategis untuk menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan norma sosial, sehingga perusahaan dapat mengamankan "izin sosial untuk beroperasi" (*social license to operate*).

Sementara itu, dari perspektif tata kelola perusahaan, efektivitas mekanisme internal sangat bergantung pada struktur dan komposisi dewan yang memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan strategis. Kebijakan mengenai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) seperti emisi karbon sering kali mencerminkan komitmen moral dan kepatuhan dari manajemen puncak. Di sinilah penerapan *good corporate governance* (GCG) menjadi katalis utama yang memastikan bahwa manajemen tidak menyembunyikan informasi negatif terkait dampak lingkungan demi keuntungan pribadi atau asimetri informasi yang merugikan pemangku kepentingan.

Komisaris independen, sebagai pilar utama pengawasan internal, memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen dengan kepentingan publik dan pemegang saham minoritas. Keberadaan komisaris yang tidak memiliki afiliasi bisnis atau kekeluargaan dengan pemilik saham pengendali diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif. Dalam kaitannya dengan isu lingkungan, komisaris independen dapat memberikan tekanan yang lebih kuat kepada jajaran direksi untuk mengalokasikan sumber daya pada sistem akuntansi karbon dan melaporkan hasilnya secara transparan, demi memitigasi risiko hukum dan reputasi di masa depan.

Selain dewan komisaris, komite audit memegang tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam mengawal kualitas dan integritas pelaporan korporat. Meskipun secara tradisional komite audit berfokus pada laporan keuangan, tren pelaporan modern telah menggeser fokus mereka ke arah laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Komite audit yang kompeten akan memastikan bahwa data emisi karbon yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi atau audit internal yang memadai, sehingga informasi tersebut memiliki reliabilitas tinggi dan terhindar dari praktik pencucian hijau (*greenwashing*).

Di sisi kepemilikan, kepemilikan institusional bertindak sebagai mekanisme monitoring eksternal yang sangat kuat. Investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau manajer investasi biasanya memiliki modal yang besar dan orientasi investasi jangka panjang. Investor jenis ini cenderung lebih sensitif terhadap risiko perubahan iklim yang dapat mendepresiasi nilai aset mereka di masa depan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi di dalam struktur saham perusahaan energi akan mendorong manajemen untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan emisi karbon sebagai bentuk manajemen risiko investasi.

Fenomena menarik lainnya yang menjadi sorotan dalam tata kelola modern adalah *board gender diversity* atau keragaman gender dalam dewan. Kehadiran perempuan dalam jajaran dewan komisaris maupun direksi membawa perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pendekatan psikologi sosial dan kepemimpinan, pemimpin perempuan cenderung memiliki tingkat empati yang lebih tinggi, orientasi jangka panjang, serta perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu sosial dan kelestarian lingkungan dibandingkan dengan pria. Kehadiran mereka diyakini mampu mereduksi dominasi keputusan yang hanya berorientasi pada profit, dan mendorong kebijakan korporat yang lebih inklusif terhadap aspek lingkungan.

Meskipun secara teoritis seluruh komponen *corporate governance* dan keragaman gender tersebut memiliki arah hubungan yang positif terhadap pengungkapan lingkungan, realitas empiris dari berbagai riset terdahulu menunjukkan hasil yang sangat beragam dan kontradiktif. Beberapa peneliti menemukan bahwa komisaris independen dan komite audit efektif dalam meningkatkan pengungkapan karbon, namun penelitian lain justru menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Kegagalan fungsi pengawasan ini sering kali dituduh terjadi karena keberadaan posisi-posisi tersebut dalam perusahaan hanya bersifat formalitas demi memenuhi regulasi semata (*tokenism*).

Inkonsistensi hasil juga terjadi pada variabel kepemilikan institusional dan *board gender diversity*. Pada beberapa kasus, investor institusional di negara berkembang kedapatan masih bersikap pragmatis dan lebih mengutamakan

deviden jangka pendek mumpung harga komoditas energi sedang melambung, sehingga mengabaikan isu pengungkapan karbon. Di sisi lain, rendahnya proporsi perempuan dalam dewan perusahaan energi di Indonesia juga diduga membuat suara mereka terpinggirkan, sehingga kehadiran perempuan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Ketidakjelasan dan pertentangan hasil-hasil empiris tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang harus diisi. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada masa sebelum pandemi atau menggunakan sampel gabungan dari seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, karakteristik emisi dan tekanan regulasi pada setiap sektor industri sangatlah berbeda. Menggabungkan sektor keuangan atau jasa dengan sektor energi dalam satu pengujian pengungkapan karbon dinilai kurang akurat karena profil risiko lingkungan keduanya sangat bertolak belakang.

Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan objeknya secara spesifik pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Sektor energi dinilai sebagai sektor yang paling *high-profile* dan paling rentan terhadap tekanan internasional maupun domestik terkait isu dekarbonisasi. Dengan membatasi analisis pada satu sektor yang homogen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam, akurat, dan kontekstual mengenai praktik pengungkapan emisi karbon yang sebenarnya terjadi di industri padat emisi ini.

Rentang tahun 2022 hingga 2024 dipilih sebagai periode pengamatan karena menawarkan konteks waktu yang sangat krusial. Pada tahun-tahun ini, dunia internasional mulai meninjau kembali komitmen *Paris Agreement*, dan Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Perubahan lanskap regulasi yang masif dalam kurun waktu 2022–2024 ini diprediksi akan mengubah perilaku dan kesadaran perusahaan energi dalam melaporkan jejak karbon mereka secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi beberapa pihak. Bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas regulasi tata kelola dalam mendorong transparansi lingkungan. Bagi para investor, hasil analisis ini dapat dijadikan panduan dalam menilai perusahaan energi mana yang memiliki komitmen tata kelola terbaik yang berpotensi memitigasi risiko iklim, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Board gender diversity menjadi faktor lain yang sering dikaitkan dengan pengungkapan lingkungan. Kehadiran perempuan dalam dewan diyakini mampu meningkatkan sensitivitas terhadap isu sosial dan lingkungan. Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh variabel-variabel tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian pada perusahaan sektor energi periode 2022–2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Fokus penelitian diarahkan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Perusahaan harus menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode penelitian. Perusahaan juga harus memiliki data yang lengkap terkait seluruh variabel penelitian. Berdasarkan proses seleksi diperoleh 131 observasi yang memenuhi kriteria penelitian.

Variabel dependen penelitian adalah pengungkapan emisi karbon yang diukur menggunakan indeks Carbon Emission Disclosure berdasarkan Choi et al. yang terdiri atas kategori climate change, greenhouse gas emissions, energy consumption, reduction and cost, serta accountability of emission carbon. Variabel independen meliputi komite independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan board gender diversity. Ukuran perusahaan dan profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Random Effect Model merupakan model yang paling sesuai digunakan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 sebagai objek penelitian. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil seleksi sampel menghasilkan 131 observasi yang layak digunakan dalam penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi sebesar 0,6730. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan emisi karbon pada tingkat yang cukup baik. Nilai minimum pengungkapan emisi karbon sebesar 0,1667 menunjukkan masih terdapat perusahaan yang mengungkapkan informasi lingkungan secara terbatas. Nilai maksimum sebesar

1,000 menunjukkan adanya perusahaan yang telah mengungkapkan seluruh indikator pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian.

Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4317. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6673. Variabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0,8107. Variabel board gender diversity memiliki rata-rata sebesar 0,1897 yang menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam dewan perusahaan sektor energi masih relatif rendah.

Tahapan selanjutnya adalah pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Random Effect Model merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami gejala multikolinieritas sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Arah Hipotesis	Hasil
H1	Komisaris Independen → Pengungkapan Emisi Karbon	Positif	Diterima
H2	Komite Audit → Pengungkapan Emisi Karbon	Positif	Ditolak
H3	Kepemilikan Institusional → Pengungkapan Emisi Karbon	Positif	Ditolak
H4	Board Gender Diversity → Pengungkapan Emisi Karbon	Positif	Ditolak

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 2. Ringkasan Kelayakan Model

Keterangan	Nilai
Model Terpilih	Random Effect Model (REM)
Prob(F-statistic)	0,0243
Adjusted R ²	0,0657
Jumlah Observasi	131
Periode Penelitian	2022–2024

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang mampu mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi informasi lingkungan. Peran pengawasan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Fungsi monitoring yang dijalankan komisaris independen mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi secara lebih transparan. Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk transparansi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Kehadiran komisaris independen mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dalam aspek lingkungan.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Transparansi tersebut dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata publik. Peran komisaris independen membantu memastikan bahwa informasi lingkungan disampaikan secara lebih terbuka dan akuntabel.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum mampu mendorong peningkatan kualitas pengungkapan informasi lingkungan. Fokus komite audit kemungkinan masih lebih diarahkan pada pengawasan laporan keuangan dibandingkan pelaporan keberlanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon tidak terlihat secara signifikan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Investor institusional belum tentu menjadikan informasi lingkungan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan investasi. Perhatian investor institusional masih dapat lebih berfokus pada aspek profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan institusional tidak mampu meningkatkan tingkat pengungkapan emisi karbon secara signifikan.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa board gender diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Proporsi perempuan dalam dewan yang masih relatif rendah diduga menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya hubungan tersebut. Kebijakan pengungkapan emisi karbon lebih banyak dipengaruhi oleh strategi perusahaan, regulasi, dan komitmen manajemen. Keberagaman gender tetap memiliki

nilai penting dalam tata kelola perusahaan meskipun belum terbukti memengaruhi pengungkapan emisi karbon secara langsung.

Pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0243 menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,0657 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 6,57% variasi pengungkapan emisi karbon. Sebagian besar variasi pengungkapan emisi karbon masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai hubungan corporate governance dan pengungkapan emisi karbon. Temuan menunjukkan bahwa tidak seluruh mekanisme tata kelola perusahaan mampu meningkatkan transparansi lingkungan. Komisaris independen menjadi satu-satunya variabel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Temuan tersebut memperkuat pentingnya fungsi pengawasan independen dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan board gender diversity terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan komisaris independen mampu meningkatkan transparansi informasi lingkungan perusahaan.

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan institusional juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan. Board gender diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan tidak selalu mampu mendorong peningkatan transparansi lingkungan secara individual.

Pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 6,57% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pengungkapan emisi karbon masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari karakteristik perusahaan, tekanan eksternal, maupun regulasi lingkungan yang berlaku.

Temuan penelitian memberikan implikasi bagi perusahaan, investor, dan akademisi. Perusahaan perlu mengoptimalkan peran komisaris independen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon. Investor dapat mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan dalam mengevaluasi transparansi lingkungan perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, memperluas sektor penelitian, serta menambahkan variabel lain agar mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon.

Referensi

- Adrian, M. A. (2023). Analisis Pengaruh Aktivitas Ekonomi Terhadap Peningkatan Emisi Karbon: Studi Empiris Empat Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 187–202.
- Andriani, K. D., Werastuti, D. N. S., & Atmaja, I. M. D. (2026). Pengaruh Media Exposure, Growth Opportunity Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal Of Economic, Bussiness And Accounting*, 9(1), 3473–3489. <https://doi.org/10.31539/W9kr2y64>
- Angelina, R., & Wibowo, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 49–68.
- Ayanga, T. A., Avortri, C., Donnir, S., & Tornyeva, K. (2024). Mediating Effect Of Corporate Governance On Corporate Social Responsibility, Market Power And Financial Performance Nexus. *American Journal Of Industrial And Business Management*, 14, 1109–1145. <https://doi.org/10.4236/Ajibm.2024.149058>
- Ayanga, T. A., Avortri, C., Donnir, S., & Tornyeva, K. (2024). Mediating Effect Of Corporate Governance On Corporate Social Responsibility, Market Power And Financial Performance Nexus. *American Journal Of Industrial And Business Management*, 14, 1109–1145. <https://doi.org/10.4236/Ajibm.2024.149058>
- Bala, H., Naim, A. A., & Alomair, A. (2025). Demystifying The Influence Of Board Gender Diversity On The Nexus Between ESG Performance And Carbon Emissions. *Humanities And Social Sciences Communications*, 1–15. <https://doi.org/10.1057/S41599-025-05733-8>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometrics Analysis Of Panel Data* (6th Ed.). Springer.
- Budianto, N. P. L., Rustiari, N. W., & Putra, I. G. C. (2024). Institutional Ownership, Board Diversity, And Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 9(2), 120–232. <https://doi.org/10.1007/S43621-026-03013-2>
- Chika, J., & Widianingsih, L. P. (2024). Board Characteristics And Carbon Emission Disclosure: Evidence From Indonesian Energy And Agricultural Industries. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.20473/Baki.V9i1.45808>
- Dewi, C. K., Aprilia, J., & Indrawati, A. (2025). The Financial Implications Of Carbon Transparency: Examining The Mediating Role Of Emission Disclosure. *Journal Of Accounting And Strategic Finance*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.33005/Jasf.V8i1.564>
- Dias, A. I., Pinheiro, P., & Fernandes, S. (2024). Gender Diversity And Climate Disclosure: A TCFD Perspective. *Springer Nature*, 28, 6025–6047. <https://doi.org/10.1007/S10668-024-05203-2>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11930>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Fidiano, A. G., & Dewi, A. A. (2026). Green Investment And Board Diversity On Carbon Emission Disclosure In Energy Sector Companies In Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 36(3), 612–628. <https://doi.org/10.24843/EJA.2026.V36.I03.P04>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Gantjowati, E., Setiawan, D., Aryani, Y. A., Santoso, A., & Wijaya, R. (2026). Board Diversity And Carbon Emission Disclosure In Indonesian Banking Companies. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/S43621-026-03013-2>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th Ed.)*. New York: Mcgraw-Hill Education.
- Haryanto, A., & Prasetyo, A. (2021). Institutional Ownership And Environmental Disclosure: Evidence From Indonesia Listed Firms. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(3), 214–225.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khairunnisa, A., Astuti, C. D., & Hussein, M. A. (2024). The Influence Of Board Diversity And Environmental Committees On Carbon Emission Disclosures In Southeast Asian Corporations. *Journal Of Green Economy And Low-Carbon Development*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.56578/Jgelcd030103>
- Kolk, A. (2020). Sustainability, Accountability, And Corporate Governance: The Role Of Institutional Investors. *Business Strategy And The Environment*, 29(1), 1–12.
- Pasya, J. A., & Fitriyani, R. (2025). The Effect Of Profitability, Leverage And Firm Size On Carbon Emission Disclosure. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 4(1), 65–76. <https://doi.org/10.21776/Reaksi.2025.4.1.464>
- Putra, A. R. D., Arum, E. D. P., & Wijaya Z, Rico. (2025). The Relationship Between Profitability, Managerial And Institutional Ownership On Carbon Emission Disclosure. *Greenation International Journal Of Economics And Accounting*, 3(2), 282–294. <https://doi.org/10.38035/Gijea.V3i2.457>
- Rikyana, F. W., Jati, K. W., Budiantoro, B. A., Khiqmah, S., & Himmatina, D. N. (2024). The Influence Of Gender Diversity, Institutional Ownership, Board Of Commissioners Meetings, And Leverage On Carbon Emissions Disclosure. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, 926–948.
- Sari, R. E., Mujiani, S., & Efrinal. (2025). Carbon Emission Disclosure: Analisis Tipe Industri Dan Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Relevan: Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2), 60–74. <https://doi.org/10.35814/Relevan.V5i2.7768>
- Suzana, Endang, D. W., Ihyaul, U., & Agung, P. (2023). Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan Dan Carbon Emission Disclosure. *Proceedings Conference On Economics And Business Innovation*, 3(1), 1005–1014.
- Syاهدanti, A., & Marietza, F. (2024). The Influence Of Profitability, Company Size, Media Exposure, And Leverage On Carbon Emissions Disclosure. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1095–1108. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V12i1.5304>
- Virtagani, F. I. (2026). An Analysis Of The Effects Of Capital Expenditure, Institutional Ownership, And Company Growth On Carbon Emission Disclosure. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.61194/Ijtc.V7i2.2211>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (5th Ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th Ed.)*. Cengage Learning.
- Yasa, F. K., & Sudana, I. P. (2025). Corporate Governance Mechanisms And Carbon Emission Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(12), 2077–2095. <https://doi.org/10.35814/Relevan.V5i2.7768>
- Yustina, A. I., Dewi, C. N., Mahmudah, H., & Andrianantenaina, H. (2024). Corporate Governance Mechanism For Carbon Emission Disclosure: Evidence From State-Owned Enterprises In Indonesia. *Global Business And Finance Review*, 29(4), 28–42. <https://doi.org/10.17549/Gbfr.2024.29.4.28>